

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau yang biasa disebut UMKM adalah suatu usaha dalam memenuhi kebutuhan ekonomi yang dilakukan oleh perorangan, kelompok masyarakat, ataupun badan usaha dalam ukuran kecil.

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 mendefinisikan UMKM sebagai:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 kriteria UMKM dibagi menjadi:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Karakteristik UMKM merupakan sifat atau kondisi faktual yang melekat pada aktifitas usaha maupun perilaku pengusaha yang bersangkutan dalam menjalankan bisnisnya. Karakteristik ini yang menjadi ciri pembeda antar pelaku usaha sesuai dengan skala usahanya. Menurut Bank Dunia, UMKM dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu:

1. Usaha Mikro (jumlah karyawan 10 orang);
2. Usaha Kecil (jumlah karyawan 30 orang); dan
3. Usaha Menengah (jumlah karyawan hingga 300 orang)

Dalam perspektif usaha, UMKM diklasifikasikan dalam empat kelompok, yaitu:

1. UMKM sektor informal, contohnya pedagang kaki lima.
2. UMKM Mikro adalah para UMKM dengan kemampuan sifat pengrajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya.

3. Usaha Kecil Dinamis adalah kelompok UMKM yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama (menerima pekerjaan sub kontrak) dan ekspor.
4. *Fast Moving Enterprise* adalah UMKM yang mempunyai kewirausahaan yang cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar.

Di Indonesia, Undang-Undang yang mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Dalam undang-undang tersebut UMKM dijelaskan sebagai: “Sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.”

Tujuan UMKM menurut UU No. 20 Tahun 2008 adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan catatan yang menjelaskan gambaran kondisi keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan dari suatu organisasi/perusahaan adalah rangkuman dari kegiatan operasi yang akan memberikan informasi bagi pihak internal maupun pihak eksternal entitas tersebut pada suatu periode akuntansi.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2018) laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan akhir periode, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas selama periode, dan catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi dan informasi penjelasan lain.

Laporan keuangan dalam Standar Akuntansi Keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015: 1) adalah : “Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”.

Laporan keuangan adalah gambaran operasi perusahaan dalam suatu periode akuntansi yang akan berguna untuk bank, kreditur, pemilik, dan pihak yang

memiliki kepentingan untuk menganalisis dan menginterpretasikan kinerja dan kondisi keuangan perusahaan.

Pengertian laporan keuangan menurut Harahap (2015: 105) yaitu, laporan keuangan adalah output dan hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan. Disamping sebagai informasi, laporan keuangan juga merupakan suatu pertanggungjawaban atau *accountability*, sekaligus menggambarkan indikator kesuksesan dalam mencapai tujuannya.

Berdasarkan berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan hasil akhir dari serangkaian proses akuntansi yang menunjukkan gambaran kondisi keuangan suatu perusahaan/entitas pada suatu periode akuntansi. Laporan keuangan digunakan sebagai acuan untuk menganalisis dan menginterpretasi suatu keputusan setelah selesai disusun.

Tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi keuangan yang berisi perubahan dari unsur-unsur yang ada pada laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan perusahaan di samping pihak manajemen perusahaan (Fahmi, 2011:28).

Para pengguna laporan akan menggunakannya untuk memprediksikan, membandingkan, dan menilai dampak yang timbul dari keputusan ekonomi yang diambil.

Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk melihat kinerja dan asset perusahaan yang diperlukan bagi pengguna, terutama bagi pihak manajemen untuk mengambil keputusan dan menilai kinerja perusahaan dimasa yang akan datang, juga sebagai bahan evaluasi dan perbandingan untuk melihat dampak yang akan timbul dari keputusan yang di ambil.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM)

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada tahun 2009 telah menerbitkan SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK

ETAP) yang juga diintensikan untuk digunakan oleh entitas kecil dan menengah. SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang lebih sederhana dibandingkan dengan SAK ETAP karena mengatur transaksi yang umum dilakukan oleh EMKM. Dasar pengukurannya murni menggunakan biaya historis, sehingga EMKM cukup mencatat aset dan liabilitas sebesar biaya perolehannya.

Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tanggal 18 Mei 2016 dan berlaku secara efektif untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai tanggal 1 Januari 2018.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) merupakan suatu standar akuntansi keuangan yang berdiri sendiri dan dapat digunakan oleh entitas yang memenuhi definisi entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan sebagaimana dalam SAK ETAP dan definisi dan karakteristik dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). SAK EMKM secara eksplisit mendeskripsikan konsep entitas bisnis sebagai salah satu asumsi dasarnya dan oleh karena itu untuk dapat menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM, entitas harus dapat memisahkan kekayaan pribadi pemilik dengan kekayaan dan hasil usaha entitas tersebut, dan antara suatu usaha/entitas dengan usaha/entitas lainnya.

Jika dibandingkan dengan SAK lainnya, SAK EMKM merupakan standar yang dibuat sederhana karena mengatur transaksi umum yang dilakukan oleh EMKM dan dasar pengukurannya murni menggunakan biaya historis sehingga EMKM cukup mencatat aset dan liabilitasnya sebesar biaya perolehannya. Entitas yang memenuhi persyaratan menggunakan SAK EMKM ini tetap perlu mempertimbangkan apakah ketentuan yang diatur dalam SAK EMKM ini telah sesuai dan memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan yang akan diterapkan, apakah berdasarkan SAK EMKM atau SAK lainnya, dengan memperhatikan kemudahan yang ditawarkan dalam SAK EMKM, dan kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan entitas tersebut.

Berdasarkan SAK EMKM penyusunan laporan keuangan yang harus disusun oleh para pelaku UMKM minimal memuat laporan sbb.

1. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan menyajikan informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas suatu entitas pada akhir setiap periode. Pos-pos yang harus ada dalam laporan posisi keuangan berdasarkan SAK EMKM, yaitu : kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset tetap, utang usaha, utang bank, dan ekuitas.

Dalam menyajikan laporan posisi keuangan tidak ada format atau urutan dari akun-akun di atas, tetapi untuk penyajian akun aset entitas dapat diurutkan berdasarkan likuiditas dan untuk akun liabilitas disusun berdasarkan jatuh tempo.

PERUSAHAAN XYZ
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 20XX

	Catatan	20XX	20XX
ASET			
Kas dan setara kas	3	XXX	XXX
Kas	4	XXX	XXX
Giro	5	XXX	XXX
Deposito		XXX	XXX
Jumlah kas dan setara kas		XXX	XXX
Piutang usaha	6	XXX	XXX
Persediaan		XXX	XXX
Beban dibayar di muka	7	XXX	XXX
Aset tetap		XXX	XXX
Akumulasi penyusutan		(XXX)	(XXX)
JUMLAH ASET		XXX	XXX
LIABILITAS			
Utang usaha		XXX	XXX
Utang bank	8	XXX	XXX
JUMLAH LIABILITAS		XXX	XXX
EKUITAS			
Modal		XXX	XXX
Saldo laba (defisit)	9	XXX	XXX
JUMLAH EKUITAS		XXX	XXX
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		XXX	XXX

Sumber : Ikatan Akuntansi Indonesia SAK EMKM, 2018

Gambar 2.1. Laporan Posisi Keuangan berdasarkan SAK EMKM

2. Laporan Laba Rugi

Menurut SAK EMKM, laporan laba rugi harus memuat akun pendapatan, beban keuangan, dan beban pajak. Penyajian laporan laba rugi dilakukan untuk mengetahui kinerja keuangan usaha dan sebagai indikator perusahaan untuk mengetahui usaha yang dijalankan mengalami kerugian atau keuntungan.

PERUSAHAAN XYZ
LAPORAN LABA RUGI
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 20XX

	Catatan	20XX	20XX
PENDAPATAN			
Pendapatan usaha	10	XXX	XXX
Pendapatan lain-lain		XXX	XXX
JUMLAH PENDAPATAN		XXX	XXX
BEBAN			
Beban usaha		XXX	XXX
Beban lain-lain	11	XXX	XXX
JUMLAH BEBAN		XXX	XXX
LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		XXX	XXX
Beban pajak penghasilan	12	XXX	XXX
LABA/RUGI SETELAH PAJAK PENGHASILAN		XXX	XXX

Sumber : Ikatan Akuntansi Indonesia SAK EMKM, 2018

Gambar 2.2. Laporan Laba Rugi berdasarkan SAK EMKM

3. Catatan Atas Laporan Keuangan

Menurut SAK EMKM (2016), catatan atas laporan keuangan memuat :

- a) Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM;
- b) Ikhtisar kebijakan akuntansi;
- c) Informasi tambahan dan rincian pos tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan. Jenis informasi tambahan dan rincian yang disajikan bergantung pada jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh entitas.

PERUSAHAAN XYZ
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 20XX

1. UMUM

Entitas didirikan di Jakarta berdasarkan akta Nomor xx tanggal 1 Januari 20XX yang dibuat dihadapan Notaris, SH., notaris di Jakarta dan mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. XX 20XX tanggal 31 Januari 20XX. Entitas bergerak dalam bidang usaha manufaktur. Entitas memenuhi kriteria sebagai entitas mikro, kecil, dan menengah sesuai UU Nomor 20 Tahun 2008. Entitas berdomisili di Jalan xxx, Jakarta Timur.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan disusun menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah.

b. Dasar Penyusunan

Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis dan menggunakan asumsi dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah.

c. Piutang Usaha

Piutang usaha disajikan sebesar jumlah tagihan.

d. Persediaan

Biaya persediaan bahan baku meliputi biaya pembelian dan biaya angkut pembelian. Biaya konversi meliputi biaya tenaga kerja langsung dan overhead. Overhead tetap dialokasikan ke biaya konversi berdasarkan kapasitas produksi normal. Overhead variabel dialokasikan pada unit produksi berdasarkan penggunaan actual fasilitas produksi. Entitas menggunakan rumus biaya persediaan rata-rata.

e. Aset Tetap

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehannya jika aset tersebut dimiliki secara hukum oleh entitas. Aset tetap disusutkan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu.

f. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan penjualan diakui ketika tagihan diterbitkan atau pengiriman dilakukan kepada pelanggan. Beban diakui saat terjadi.

g. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

3. KAS

	20XX	20XX
Kas kecil Jakarta – Rupiah	XXX	XXX

4. GIRO

	20XX	20XX
PT. Bank ACA – Rupiah	XXX	XXX

5. DEPOSITO

	20XX	20XX
PT. Bank XXX – Rupiah	XXX	XXX
Suku Bunga – Rupiah	4,50%	5,00%

6. PIUTANG USAHA

	20XX	20XX
Toko A	XXX	XXX
Toko B	XXX	XXX
Jumlah	XXX	XXX

7. BEBAN DIBAYAR DI MUKA

	20XX	20XX
Sewa	XXX	XXX
Asuransi	XXX	XXX

Lisensi dan perizinan	XXX	XXX
Jumlah	XXX	XXX
8. UTANK BANK		
<p>Pada tanggal 4 Maret 20XX, Entitas memperoleh pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) dari PT Bank ABC dengan maksimum kredit Rpxxx, suku bunga efektif 11% per tahun dengan jatuh tempo berakhir tanggal 19 April 20XX. Pinjaman dijamin dengan persediaan dan sebidang tanah milik entitas.</p>		
9. SALDO LABA		
<p>Saldo laba merupakan akumulasi selisih penghasilan dan beban, setelah dikurangkan dengan distribusi kepada pemilik.</p>		
10. PENDAPATAN PENJUALAN		
	20XX	20XX
Penjualan	XXX	XXX
Retur Penjualan	XXX	XXX
Jumlah	XXX	XXX
11. BEBAN LAIN-LAIN		
	20XX	20XX
Bunga Pinjaman	XXX	XXX
Lain-lain	XXX	XXX
Jumlah	XXX	XXX
12. BEBAN PAJAK PENGHASILAN		
	20XX	20XX
Pajak penghasilan	XXX	XXX

Sumber : Ikatan Akuntansi Indonesia SAK EMKM, 2018

Gambar 2.3. Catatan Atas Laporan Keuangan berdasarkan SAK EMKM

2.2. Review Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan yang di buat oleh para pelaku UMKM dalam menyajikan laporan keuangan berdasarkan ketentuan SAK EMKM menjadi dasar penelitian ini untuk ditelaah lebih lanjut. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Nurfadilah Ukhti Fatahillah (2021) berjudul Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM Pada UMKM Warung Makan Mbak Rina menemukan bahwa subjek penelitian hanya mencatat penerimaan dan pengeluaran kas harian sebagai laporan keuangannya, begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Mortigor Afrizal Purba (2019) berjudul Analisis Penerapan SAK EMKM Pada Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Di Kota Batam, di mana sebagian besar pelaku UMKM di Kota Batam hanya mencatat laporan keuangan secara sederhana sesuai dengan pemahaman masing-masing manajemen usaha dan kebutuhan usahanya.

Penelitian yang berjudul *Financial Report for Micro, Small, and Medium Enterprise According to Financial Accounting Standards: Case Study Rafita Cake* yang dilakukan oleh Rahmad Firdaus dan Ludavicus Sensi Wondabio (2017) juga menemukan hasil yang sama di mana subjek penelitian hanya membuat laporan keuangan sederhana berisi informasi penerimaan dan pengeluaran kas yang dibuat berdasarkan penerimaan penjualan dan catatan pengeluaran harian. Penelitian oleh Aprilia Cintya Dewi, Suparti, dan Nurika Restuningdiah berjudul *The Analysis of Accounting System Formulation Based on SAK EMKM* yang mengambil UMKM RM. Ayam Inkgung Bu. Sutini sebagai objek penelitian dengan hasil laporan keuangan yang disusun masih secara manual dengan hanya mencatat beban dan penerimaan kas. Tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hendy Satria dan Jery Hendika berjudul SAK EMKM : Penyusunan Laporan Keuangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah kepada UMKM CV. Mitra Dinamis menemukan bahwa subjek penelitian membuat laporan keuangan usaha berupa catatan pesanan, *invoice*, dan catatan pengeluaran kas saja.

Kurangnya pengetahuan, informasi, waktu, sumber daya manusia, dan sosialisasi mengenai penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM menjadi kendala

terbesar bagi para pelaku usaha dalam membuat laporan keuangan usahanya yang sesuai dengan standar.

Lalu Hasan Habibi dan Iyeh Supriatna (2021) melakukan penelitian terhadap UMKM Qaya Laundry menemukan bahwa subjek penelitian masih melakukan pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan secara manual sehingga peneliti tertarik untuk membuat laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM pada aplikasi keuangan berbasis android SI APIK. Penelitian yang dilakukan oleh Neny Tri Indrianasari dan Emmy Ermawati (2021) berjudul *Implementation of Technology Based SAK EMKM terhadap Joys Kitchen dan Rezky Photocopy* juga mendapatkan hasil bahwa pencatatan laporan keuangan masih dilakukan secara tradisional atau manual sehingga belum mengetahui pencatatan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan EMKM dan masih terkendala dalam penginputan transaksi laporan keuangan pada aplikasi keuangan berbasis android menggunakan LAMIKRO.

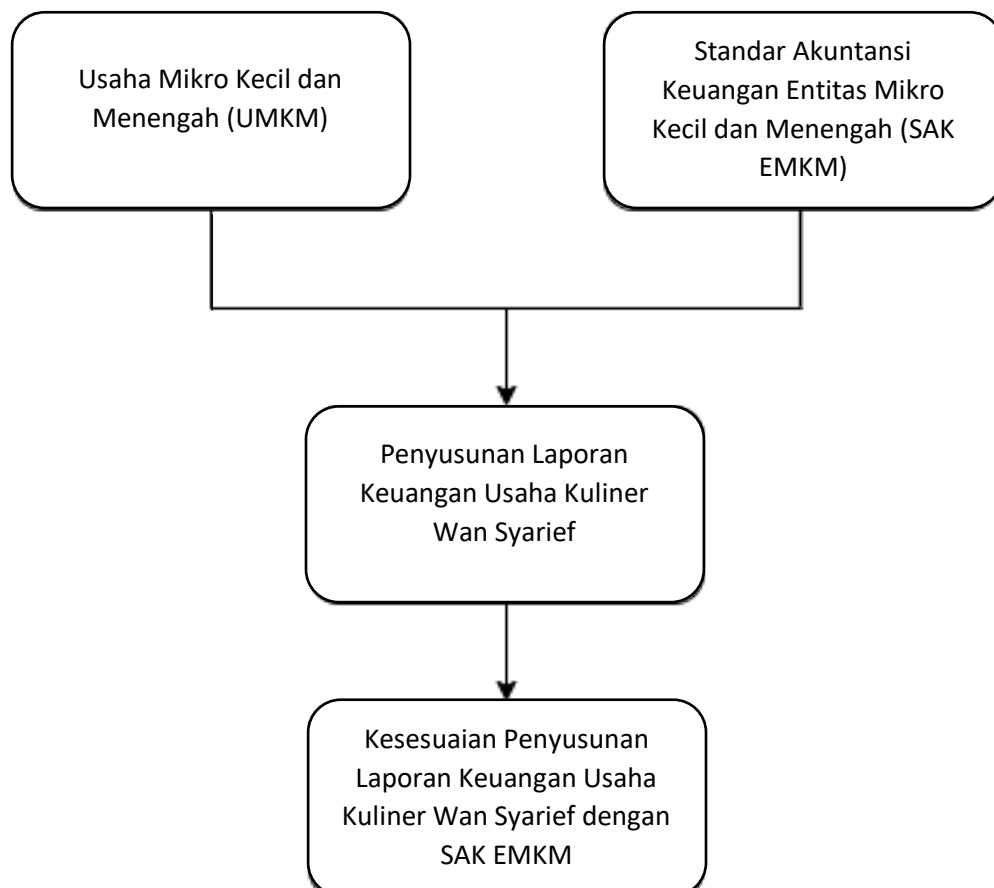
Rendahnya pemahaman para pelaku UMKM dalam mencatat transaksi laporan keuangan menggunakan aplikasi akuntansi keuangan berbasis android seperti SI APIK dan LAMIKRO menjadi salah satu kendala dari pelaku usaha dalam membuat laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM).

Penelitian yang dilakukan oleh Sulistia Suwondo (2021) kepada UMKM CV NELL'Q Persada Mandiri berjudul Analisis Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan SAK EMKM yang belum sepenuhnya membuat laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM, subjek penelitian sudah membuat laporan keuangan berupa Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi tetapi belum membuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan kesalahan penulisan ayat jurnal transaksi yang dicatat langsung ke dalam buku besar.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian yang dilakukan terhadap objek penelitian, para pelaku usaha (subjek penelitian) belum melakukan penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar yang ada yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan

Menengah (SAK EMKM). Sebagian besar penyebab dari penyusunan laporan keuangan yang belum sesuai dengan standar yang ada dikarenakan oleh pemahaman tentang SAK EMKM para pelaku usaha yang masih rendah, minimnya pemahaman tentang teknologi informasi akuntansi yang ada, dan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu usaha.

2.3. Kerangka Konseptual Penelitian



Gambar 2.4. Kerangka Konseptual Penelitian